

**Nahdlatul Ulama : Politik Kebangsaan Pada Masa Dr. Kh. Idham Chalid  
( 1956-1984 )**

Khairul Tri Anjani, Darmawan Rahmadi, Yeni Handayani

Email : [khairul3anjani@gmail.com](mailto:khairul3anjani@gmail.com)

Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia

**ABSTRACT**

*The research aims to determine the NU political figure named Dr. Kh. Idham Chalid, he was a scholar and politician who was very successful in his time. In Religious Science, Dr. KH. Idham Chalid is known as a great NU scholar and politician who is very influential for NU people. NU under the leadership of Dr. KH. Idham Chalid was able to play his role in maintaining Islamic organizations that were critical of government policies from the Old Order to the New Order. In the political field, NU adheres to the concept of sunnism which is more concerned with the concepts of harmony and social stability. On the other hand, regarding Dr. KH. Idham Chalid, who was flexible and flexible in his leadership, was able to bring NU to defend Indonesia during the ups and downs of building a new cabinet. In this study will discuss the biography of Dr. Kh. Idham Chalid and his leadership to national politics from 1956-1984. This study uses the historical method through several stages, namely Heuristics, Criticism, Interpretation, and Historiography.*

**Keywords :** *Nahdlatul Ulama, National Politics, Dr. KH. Idham Chalid*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan Islam Indonesia merupakan proses yang berkaitan dengan berbagai faktor yang merupakan kehidupan lainnya sangat kompleks. Untuk sebagian dapat diterangkan melalui keterlibatan kegiatan perdagangan yang dilakukan sehingga dapat berkembang sejak abad XI. Intensitas kontak-kontak pedagang menghasilkan tumbuhnya permukiman Syarikat Islam di pesisir kepulauan Nusantara (Ali, 2011: 1).

Meski demikian, keberhasilan Islam menembus akar kehidupan masyarakat Indonesia, tidak berarti akar akan lama yang bersumber tradisi Islam dan budaya setempat. Pergumulan Islam dengan nilai budaya membuat masyarakat setempat menyesuaikan diri tanpa harus kehilangan ide diri sendiri. Penghadapan Islam dengan realitas sejarah, akan memunculkan realitas baru, bukan hanya untuk meemunculkan pergumulan baru tapi juga tantangan yang harus dijawab.

Pada tahun 1912, di Indonesia lahir organisasi keagamaan yang juga concern dalam pemikiran Kaum Wahabi, yakni Muhammadiyah. Organisasi ini menggaap bahwa tadisi yang ada di Indonesia dianggap tradisi para kiai telah di penuh oleh hal hal yang bersifat Tabayyul dan Bid'ah, yang terjadinya stagnansi pada kaum muslim.

Organisasi Jami'iyah Nadlatul Ulama yang didirikan tahun 1926 di Surabaya merupakan salah satu wujud fenomena di atas. Dipelopori oleh banyak ulama yang berpusat di pesantren yang mereka tinggal, organisasi NU memiliki wawasan yang sangat luas dalam hal beragama dan berilmu pada tradisi keilmuan teologis, berkesinambungan dengan rantai historis sejak abad pertengahan, yaitu disebut "Ahlusunnah wal Jamaah". Pandangan ini menekankan bahwa ada tiga prinsip yaitu mengikuti paham Asy'ariah dan Maturidiyah dalam bidang teologi, mengikuti salah satu mazhab empat dalam bidang fikih, dan mengikuti paham Al-Junaid dalam bidang Tasawuf (Ali, 2011: 2).

Dalam keadaan disorientasi dan keterancaman, maka NU berupaya mempertahankan eksistensinya diri dalam komunitas, serta mencoba menahan apa yang ada di pemerintahan Belanda dengan cara kegiatan politik praktis. Ini terlihat di mana NU mendukung pemerintah Belanda, serta membangun komunikasi dengan para pemimpin Islam lainnya, hingga tahun 1939 Muhammadiyah, Partai Syarikat Islam, dan NU membentuk MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia) sebagai organisasi payung pelindung Islam di Nusantara beserta para santri- santrinya.

Gagasan dibentuk pertama kali NU yang hanya membahas wawasan sosial keagamaan. Meskipun demikian ilmu sosial tersebut tidak lantas menjadikan NU mengabaikan soal-soal politik. Sekitar awal tahun tiga puluhan NU terlibat dalam perumusan tata cara pernikahan dengan pemerintah Belanda bukan hanya itu saja NU melibatkan dalam soal politik antara lain pengangkatan penghulu.

Langkah konkret yang timbul dari orientasi politik NU adalah dengan bergabung nya NU ke dalam Majelis Islam 'Ala Indonesia (MIAI) pada tahun 1939 untuk menggalang kekuatan umat Islam menghadapi penjajah. (Rifai, 2010: 90). Menurut Feillard (1999:29), keterlibatan NU dalam membawa perubahan orientasi para pemimpin NU dari peroslan keagamaan dan sosial ke persoalan Poltik ketika MIAI dibubarkan dan digantikan dengan Masyumi tahun 1943, NU mulai masuk dalam pemerintahan yang dikuasai Jepang. Keikutsertaan dalam Masyumi banyak membawa keuntungan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Dinamika perjuangan NU tidak lepas dengan bidang sosial, politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan bahkan tidak lepas dengan arah kepemimpinan ketua umum PBNU. Dinamika Pemimpin NU Dari banyak mengalami perubahan yang signifikan. Termasuk tokoh Dr. KH. Idham Chalid yang tercatat bahwa ketua umum PBNU terlama sekitar 28 tahun. Di bawah kepemimpinan Dr. KH. Idham Chalid, NU memiliki peran aktif dalam bidang politik pada masa Orde Lama hingga Orde Baru. Hal ini memunculkan evaluasi yang terjadi terhadap kepemimpinan ketua umum PBNU sebelumnya dengan kepemimpinan KH. Idham Chalid. Perjuangan NU yang eksis dalam politik praktis dipengaruhi kiprahnya Dr. KH. Idham Chalid atas berbagai prestasi jabatan yang pernah disandangnya.

Dr. KH. Idham Chalid adalah tokoh yang hidup dalam pemerintahan awal kemerdekaan, masa Orde Lama hingga ke Orde baru. Pada masa Orde Lama, Dr. KH. Idham Chalid terkenal dekat dengan Preside Soekarno. Kedudukannya dalam pemerintahan sangatlah penting membawa NU tetap eksis dalam pentas politik praktis Orde Lama. Khususnya dalam menanggapi sistem demokrasi terpimpin. Pada masa awal Orde Baru, Dr. KH. Idham Chalid semula masih kenal dengan kesetiaannya dengan Presiden Soekarno, mampu mempertahankan NU pada masa Presiden Soeharto. Dalam menjalankan tugas nya sebagai ulama dan politisi, Dr. K.H. Idham Chalid sangat luwes dan menggunakan jalan tengah dalam menyelesaikan masalah dalam menghadapi kebijakan pemerintah. Sikap moderat pada diri Dr. KH. Idham Chalid yang di tanamkan adalah sesuai dengan tradisi Sunni yang berpedoman pada hukum fikih. Beliau seorang ulama dan politisi yang menjadi pucuk kepemimpinan seperti hal nya menjadi lembaga eksekutif, legislatif dan ormas seperti Wakil Perdana Presiden selain itu Idham Chalid pernah menjadi ketua DPR/MPR dan ketua umum PBNU. Beliau juga pernah menjadi ketua partai politik seperti Masyumi, Nadlatul Ulama, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Fealy (2003:187), keterkaitan Dr. KH. Idham Chalid dengan NU mulai dari tahun 1952 ketika ia masih aktif di organisasi Gerakan Pemuda Ansor. Kemudian sebagai ketua PB Ma'arif dengan lebih memfokuskan pendidikan pada tahun 1952. Pada tahun yang sama, ia diangkat sebagai PBNU menjadi sekretaris jenderal partai. Selama masa pemilu 1955, Dr. KH. Idham Chalid memegang jabatan penting sebagai Ketua Lajnah Pemilihan Umum Nadlatul Ulama (Lapunu).

Muktamar ke-21 diselenggarakan di Sumatera Utara, Medan, ini adalah ketiga kalinya sepanjang tiga puluh tahun sejarah NU. Muktamar diselenggarakan di luar pulau Jawa. Dr. KH Idham Chalid di tunjuk sebagai ketua umum PBNU. Ia dengan telak mengguli Muhammad Dachlan yang telah jabatan itu sejak April 1953. Perkembangan karirnya sangat mengagumkan mengingat beliau berbeda dengan pengurus NU lainnya yang merupakan orang luar pulau Jawa. Sedangkan beliau bukan orang Jawa dan lulusan pesantren Gontor di Ponorogo, lembaga yang tidak ada hubungannya dengan NU dan banyak di pandang ulama sebagai tulang punggung modernisasi Islam (Muhajir, 2007: 42).

Perjuangan Dr. KH. Idham Khalid sebagai ulama dan politisi banyak mendapat pengaruh dari KH. Abdul wahab Hasbullah, gurunya. Pasangan dengan Rais am KH. Wahab ini membuatnya mampu membawa NU tahan sampai 28 tahun terhadap badai politik yang mengantam keras NU pada tahun 1965-1984 M. Ketika NU baru menjadi partai Politik di tahun 1952, kemudian mengikuti pemilu 1955 dan berhasil menjadi peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi.

Kiprah NU di pemerintahan sangatlah sulit dan harus melewati rintangan untuk menjadi Partai besar. Dalam pentasnya di politik Indonesia membawa pengaruh dalam perpolitikan Indonesia. Di satu sisi, NU sebagai organisasi keagamaan. Tetapi di sisi yang lain NU harus eksistensi dalam berpolitikan sehingga menjadikan politik yang lentur dan fleksibel. Pada masa yang terjadi di Indonesia dengan adanya perubahan masa Orde lama ke Orde Baru, dengan karakter kepemimpinan Dr. KH Idham Chalid tetap mendapatkan kepercayaan dari pemerintahan. Masa krisis yang menentukan ialah pada masa Dekrit Presiden 1959 dengan kembalinya UUD 45 yang berimplikasi pergantian yang tadinya Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin. NU tetap aktif dalam menjalankan politiknya dan mengikuti apa yang pemerintah lakukan pada masa tersebut. Presiden tetap dikontrol, harus tetap ada ide mekanisme Check and Balances. Dengan begitu NU tetap konsisten mengikuti perjuangan pemerintah.

Pada uraian di atas, prestasi yang dimiliki Dr. KH. Idham Chalid sangat baik bagi politik NU. Beliau adalah pemimpin yang mampu mempertahankan posisinya dalam pemerintahan. Pucuk kepemimpinan Idham Chalid sangat menarik untuk dikaji. Pada masa kepemimpinan Dr. KH. Idham Chalid dinilai menjadi puncaknya politik NU karena banyak berperan besar sejak pemilu 1955 hingga masa Orde Baru. Beliau menyatakan bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin yang di pimpin oleh Soekarno yang menonjolkan musyawarah mufakat sejalan dengan syura dalam Islam. Dr. KH. Idham Chalid berpendapat pertentangan yang terjadi pada partai- partai politik sangat khas dengan era Parlemerter tidak diajarkan dalam Islam. Puncaknya pada saat Indonesia mengalami perubahan masa pemerintahan dari Soekarno ke pemerintahan Soeharto NU tetap bertahan dikarenakan Dr. KH. Idham Chalid sangat dekat dengan presiden Soeharto sehingga NU dapat bertahan sampai masa Orde Baru. Kondisi tersebut menjadikan negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran NU. Selain itu, Karakter yang ada didalam diri Dr. KH. Idham Chalid

memiliki ciri khas dalam berpolitik. Dr. KH. Idham Chalid dikenal sebagai orang politik yang sangat luwes dan moderat dalam mengambil keputusan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis. Sartono (dalam Sjamsudin, 2007) membedakan antara metode sebagai “bagaimana orang memperoleh pengetahuan?” (*how to know*) dan metodologi sebagaimana “mengetahui bagaimana harus mengetahui” (*to know to now*). Dengan demikian, jika diharapkan sesuai dengan proses penelitian sejarah, Metode sejarah, menurut Abdurahman (1999) merupakan “Bagaimana mengetahui sejarah”, sementara metodologi sejarah adalah “mengetahui bagaimana alur cerita dari sejarah”. Pengumpulan data di dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan sumber melalui buku-buku sejarah diantaranya buku karya Ahmad Muhajir dengan judul “ Idham Chalid ( Guru Politik Orang NU ) ” . Buku ini membahas riwayat perjalanan hidup Idham Chalid sampai menuju dunia politik. Terdapat fakta yang peneliti temukan dari buku tersebut dimana, secara tidak langsung membuka tabir tersembunyi atau sisi senyap pemikiran Idham Chalid dan bisa menambah dertan “ Mosaik ” langkah para politisi NU di kancah politik yang kurang banyak diungkap ke permukaan. Peneliti juga menggunakan beberapa buku yang nanti akan masuk proses verifikasi untuk di lihat synopsis dan simpulan buku tersebut sebagai bahan tambahan dal sumber penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Kehidupan Dr. KH. Idham Chalid**

Dr. KH. Idham Chalid, terletak di Desa Setui dekat kawasan Kota Baru di sebelah tenggara Kalimantan Selatan, Senin 5 Muharram 1341 Hijriyah dan 27 Agustus 1922. Pada tanggal 27 Agustus 1922 adalah hari Minggu, sedangkan tanggal 5 Januari 1922 adalah hari Senin. Saat itu, Setui menjadi ibukota onderdistrik, masuk wilayah Tanah Laut di Paleihari, Kalimantan Selatan. Pada tahun 1925, Setui memasuki kawasan Tanah Bambu Pegatan dan statusnya diturunkan menjadi sebuah desa (kelurahan). Saat itu, kepala ondistrik adalah asisten kiai, dan ayahnya Muhammad Chalid diangkat menjadi penghulu. Muhammad Chalid mempunyai sebagai penangan buaya, kemudian ada sungai di Setui (Setui), banyak buaya liar dan ganas seperti dan menghuni sungai ini.

Dr. KH. Idham Chalid rukun dengan delapan saudara kandungnya. Muhammad Chalid (sang ayah) masih berdarah bahasa Melayu Banjar asli. Sang ayah menikah dua kali, istri pertamanya Umi Antung melahirkan tiga orang anak (perempuan dan laki-laki), yaitu Maswah, Siti Gumrah dan Abdul Hakim. Hj. Umi Hani, asli setui berdarah banjar dan melayu. Sang istri kedua melahirkan lima orang anak ( tiga laki laki dan dua perempuan), yaitu Thunder, Hasbullah, Nikmah, Nurjanah, dan Idham merupakan anak sulung atau anak terakhir. Menurut H. Ridwan Bakri, kerabat

Dr. KH. Idham Chalid, mereka memiliki delapan suara untuk hidup rukun dan sangat dekat dengan istri ayah mereka.

Dari usia muda hingga 8 tahun, Dr. KH. Idham chalid mulai belajar membaca dan menulis (Latin dan Arab) dan Alquran dari ayahnya. Karena tidak ada sekolah dasar di Setui saat itu, Idham Chalid belajar di pesantren sederhana bersama keluarga dan murid ayahnya. Pada awal tahun 1930, Idham chalid dan keluarganya pindah ke Pegatan, ibu kota wilayah Tanah Bambu, di mana Setui menjadi bagiannya. Pada tahun 1931, Dr. KH. Idham Chalid memasuki satu-satunya sekolah dasar (Gouvermen 2 Klasse) di Pegatan. Dalam hobi membaca Dr. KH. Idham Chalid lebih besar dari hobinya bermain dengan anak-anak lain. Hal ini mencerminkan kepribadian Dr. KH. Idham Chalid, anak masyarakat yang cerdas, sangat senang meminjam buku di kantor persewaan buku Indonesia di Balai Batavia. Proyek pemerintah sekolah dasar Gubernur kelas II Saat itu, ia teringat nama-nama sastrawan yang disegani seperti Muhammad Hasim, Suman H.S., N. St. Iskandar, Abdoel Moeis, Marah Rusli, dll.

Di Akhir tahun 1932, Dr. KH. Idham Chalid dan keluarganya meninggalkan Pegatan menuju kampung halaman ayahnya, Amuntai. Dalam perjalanan ke Amuntai, Dr. KH. Idham Chalid masuk di sekolah Gouvermen 2 Klasse (Vervolgschool). Di sekolah ini, Idham Chalid diterima dikelas IV pada awal tahun ajaran. Setelah lulus dari Vervolgschool pada tahun 1934, ia masuk Pesantren/Madrasah Islam di Pekapuran, dipimpin oleh Tuan Guru Haji Abdurrasyid, beliau adalah seorang ulama besar bersyahada 'Alimiyah dari Universitas Al-Azhar di Kairo. Saat Dr. KH. Idham Chaid masuk pesantren, ketua dari Tuan Guru Hajid Abdurrasyid berpulang ke Rahmatullah, sehingga yang memimpin perguruan tinggi saat itu adalah Mu'alim haji Djuhri Sulaiman yang juga seorang lulusan Al- Azhar. Untuk mengenang dan memperingati Tuan Guru Hajid Abdurrasyid, nama pesantren diubah menjadi Al-Madrasatur Rasyidiyyah. Dr. KH. Idham Chalid baru mempelajari di pesantren ini sekitar empat tahun.

Pada akhir tahun 1938, atas restu ayah dan gurunya, Dr. KH. Idham Chalid meninggalkan Amuntai dan pergi ke Pondok Modern Gontor di Ponorogo untuk melanjutkan sekolahnya. Pondok Modern Gontor terletak di desa Gontor dekat Sungai Malo di Kecamatan Mlarak, sekitar 12 kilometer selatan kota Ponorogo.

Awalnya petani ini bernama Pondok Pesantren Darussalam dan berdiri pada tanggal 9 Oktober 1926. Dr. KH. Idham Chalid ditempatkan di Sekolah I Kweek School (Onderbouw) yang diterima selama dua tahun. Kemudian dia naik ke jenjang Kweek School Islam (Bovenbouw) atau KMI di sekolah menengah. Pada tahun 1940, ia sempat mengajar di sekolah menengah Madrasah Pondol Modern Gontor Ponorogo (Bovenbouw Kweek School Islam).

Keterampilan bahasa asing Idham Chalid tidak hanya bahasa Arab dan Inggris. Tetapi dia juga bisa menguasai bahasa Jepang. Jadi pada tahun 1943 (Ahmad, 2007:25), Karena keikhlasannya ingin belajar bahasa Jepang, salah seorang gurunya di Pondok Modern Gontor, Ustadz Imam

Zarkasyi, memberinya kesempatan datang ke Jakarta untuk mengikuti undangan Syumubu (Kantor Agama Gunseikanbu). Atas rekomendasi Syumubu, Dr. KH. Idham Chalid diterima belajar di bagian Djakarta Nippongo Gakko di Jl. Cilacap Jakarta. Dia berkembang sangat cepat dalam menguasai bahasa Jepang. Padahal, bahkan dia pernah menjadi seorang guru bahasa Jepang. Orang Jepang sangat senang karena pemuda pribumi bisa menguasai bahasanya (Muhajir, 2007: 26).

### **Politik Kebangsaan Masa Dr. Kh. Idham**

Dalam politik, Nahdlatul Ulama cenderung lebih sering berpolitik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. Kebijakan politik kebangsaan Nahdlatul Ulama sudah ada sejak Nahdlatul Ulama berjuang melawan Kolonialisme Belanda. Politik kebangsaan adalah politik yang orientasinya untuk kepentingan masyarakat umum, dan bukan kepentingan sendiri atau kelompok. Islam adalah petunjuknya mengatur segala aspek kehidupan, termasuk mengatur urusan dunia dan dibagian selanjutnya. Dengan prinsip inilah, Nahdlatul Ulama selalu menempatkannya dalam kebijakan Islam sebagai sumber nilai dan kearifan, bukan sebagai alat mencapai kepentingan politik praktis.

Nahdlatul Ulama yang semula merupakan wadah saluran politik bagi partai- partai yang keluar dari Masyumi secara resmi mengumumkan keluar pada tahun 1952. Ini dimulai pekerjaan Nahdlatul Ulama dilakukan dengan membuat partainya sendiri. Periode transisi tahun 1952-1955 merupakan masa ekspansi dan konsolidasi bagi partai Nahdlatul Ulama. Pada pemilu 1955, Nahdlatul Ulama menempati urutan ketiga setelah PNI dan Masyumi. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa di era awal Nahdlatul Ulama sangat dini.

Prinsip-prinsip yang dianut Nahdlatul Ulama memiliki beberapa konsekuensi lawan sikap politiknya. Pertama, dalam banyak situasi, Nahdlatul Ulama tekankan perlunya berhati-hati, fleksibel dan memilih jalan tengah. Karena pendekatan ini tidak membahayakan dibanding dengan permusuhan dan konfrontasi. Kedua, pandangan kekuasaan sebagai faktor penentu dalam kenyataan pilih strategi. Sebelum membuat keputusan penting, para ulama harus pertama pertimbangkan kekuatan rakyatnya sebelum kekuatan pemerintah atau kekuatan lain dalam masyarakat. Perlawanan terhadap kekuatan yang lebih besar hanya akan meningkatkan risiko kerugian untuk Islam. Ketiga, gencar mempromosikan Nahdlatul Ulama gunakan metode partisipatif untuk mengatur pemerintah. Jika ingin menggunakan politik untuk mencapai tujuan, maka Nahdlatul Ulama harus bergabung memiliki kekuasaan tertentu dalam pemerintahan (Fealy, 2003 : 25)

Pandangan fiqih seringkali lebih menunjukkan sifat NU akomodatif dan fleksibel, sehingga NU sering dituduh oportunistik atau memuaskan selera pengusaha. Tuduhan itu tidak sepenuhnya adil karena ada pada dasarnya apa yang dilakukan NU adalah mengimplementasikan sistem nilai atau prinsip pengajaran di lingkungan NU. Bagi NU, petunjuknya bukanlah "strategi perjuangan politik" atau "ideologi Islam" dalam pengertian ini abstraksi, tetapi validitas di mata hukum fikih.

Selama diatas sistem nilai esensi atau prinsip ajaran NU tidak memberikan alternatif lain, penampilan NU akan tetap luwes, fleksibel dan akomodatif.

Namun, jika keseluruhan prinsip pengajaran atau sistem nilai telah terganggu, sehingga NU bisa menjadi keras tanpa kompromi. Sikap ini ditunjukkan NU pada masa PKI mencoba mengubah dasar negara Pancasila pada tahun 1965. NU satu-satunya partai politik yang meminta pemerintah segera membubarkan PKI. Selain itu, menghadapi tahun hukum RUU perkawinan 1974, yang membawa banyak aspek negatif bagi umat Islam, atas prakarsa Rais KH. Bisri Syansuri berhasil menolak dan melakukan perubahan pada beberapa artikelnnya.

Kecenderungan NU untuk mengakomodasi dapat dibuktikan dengan keikutsertaannya dalam jabatan kabinet pertama Ali Sastroamidjojo I (1953-1956), penerimaannya atas konsepsi Soekarno dan usulan Kabinet Karya pada tahun 1957. Kecenderungan ini juga terlihat selama NU menyetujui kembali UUD 1945 dengan Dekrit, mendukung pembentukan DPR-GR, dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Soekarno dan bekerja sama dengan rezim Orde Baru. Sikap militansi NU dapat dilihat dari keluarnya NU dari Masyumi pada tahun 1952, desakannya pada Piagam Jakarta disebutkan kembali dalam konstitusi 1959, perlawanan fisiknya terhadap tindakan gerakan komunis tahun 1964-1965, serta keterlibatannya dalam menumpas PKI setelah percobaan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada tahun 1965. Ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden mengembalikan posisi UUD 1945 sebagai dasar Negara. Tetapi posisi Piagam Jakarta masih dianggap jiwa dan rangkaian tidak bisa dipisahkan dari UUD 1945. Akhirnya, NU menerima pernyataan bahwa Piagam Jakarta Tanggal 22 Juni 1945 menghidupkan kembali UUD 1945 dan merupakan rangkaian Kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Motivasi utama NU adalah materi dan status. Hal ini bisa dilihat oleh partai- partai dari sikap NU yang sering berganti-ganti sikap politik menjadi menyelamatkan posisinya dalam pemerintahan. NU selalu dituduh oportunistik artinya partai ini tidak memiliki aturan atau kewajiban, tidak pernah berpegang pada aturannya. Misalnya, NU sudah mengikrarkan komitmennya pada solidaritas Islam, namun partai ini sudah berulang kali membangun aliansi dengan kubu nasionalis untuk melawan Masyumi. NU juga menyatakan dukungannya untuk Demokrasi Parlementer dan Piagam Jakarta, namun kemudian menerima Demokrasi Terpimpin. Tuduhan sebagai oportunis tidak cukup untuk menggambarkan hal ini motivasi dan langkah NU dalam politik, kecuali bersumber dari konsistensinya dalam menerapkan prinsip mengutamakan kepentingan Islam dan para pengikutnya melampaui segala pertimbangan (Fealy, 2003 : 26).

Selain prinsip utama NU, Dr. KH. Idham Chalid sendiri percaya politisi moderat cenderung bekerja sama daripada konfrontasi. Mingguan Tempo juga menyatakan bahwa dalam dunia politik, Dr. KH. Idham Chalid adalah sosok yang lembut, toleran, dan suka mengikuti arus tanpa terlibat di dalamnya (Fealy, 2003 : 361-370). Kabinet mengalami pasang surut dan pemerintah bergerak maju mundur, tetapi Dr. KH. Idham Chalid tidak bertahan sampai berusia kepala enam dan tetap

menjabat. Posisi jangka panjang yang dipegangnya sangat mengesankan. Ia dituding licin, bahkan oportunistik. Namun dengan kepintarannya membuat bersikap toleran dan mudah diterima semua pihak. Menghadapi berbagai penilaian di mata masyarakat, Dr. KH. Idham Chalid tidak banyak bicara. Ia hanya menanggapi : "Saya hanya mengabdikan pada negara dan tanah air sebagai sedekah kepada Allah SWT. Sebagai seorang muslim, saya selalu berdoa kepada Allah SWT agar saya menjadi Khusnul Khotimah".

Hubungannya dengan beberapa tokoh membentuk kepribadiannya dalam menentukan arah masa depan NU yang telah ia pegang selama 28 tahun. Dr. KH. Idham Chalid dan Presiden Soekarno memiliki beberapa kesamaan yang mempengaruhi cara berpikir dan perilaku Dr. KH. Idham Chalid sendiri dan NU. Baik Dr. KH. Idham Chalid maupun Soekarno memiliki gaya kepemimpinan mempribadi (personalisasi). Soekarno lebih suka mengembangkan strategi dan strategi politiknya sendiri. Dia mengandalkan pesona dan kemampuan pribadi baca situasinya dengan bijak. Dia memiliki kemampuan untuk "memanipulasi" dan bermain antara partai besar dan militer, akhirnya bisa dapatkan dukungan dari partai politik besar dan elit militer untuk mempraktikkan sistem Demokrasi terpimpin (Muhajir, 2007 : 52)

Sementara sejak Dr. KH. Idham Chalid diangkat menjadi Ketua Umum PBNU telah mengubah ruang administrasi kepengurusan dengan cara sebagai mengontrol NU dari rumahnya. Ia bukan orang yang tegas menegakkan aturan organisasi layaknya KH. M. Dachlan (Ketua Tanfidziah PBNU periode 1953-1956), melainkan suka membantu kepada siapa pun yang datang, baik berupa materi, saran maupun rekomendasi. Dengan memiliki sifat ringan tangan dan menggunakan posisinya membantu siapa pun, dengan sendirinya akan membuat jaringan patronase ini sangat berguna baginya karena banyak orang yang berhutang padanya secara pribadi, bukan kepada NU. Kharismanya membuat orang itu orang-orang yang berhubungan dengannya sangat nyaman, jadi dia mendapat julukan itu Ahli Yahannu. Istilah sehari-hari yang ada dikalangan pesantren yang berarti "mengatakan hal yang menyenangkan orang lain". Gaya kepemimpinan inilah yang membuat dia bertahan lama di jajaran teratas Ketua Tanfidziah PBNU (Muhajir, 2007 : 52).

Baik Soekarno dan Idham Chalid adalah pembicara yang sangat baik. Kehabatan Soekarno dalam pidatonya mampu membangkitkan pesona dan memainkan emosi pendengarnya. Dr. KH. Idham Khalid yang lebih tenang dalam pidatonya itu juga bisa menggugah semangat dan simpati para pendengarnya. Ia seseorang yang berprofesi sebagai diplomat, selalu terlihat tenang, dan sering menciptakan orang yang marah menjadi tidak berdaya. Greg Fealy mencatat bahwa kepribadian dan gaya kepemimpinannya yang ahli komunikasi, dia memiliki banyak lelucon, dan sangat pandai membaca suasana hati pendengar. Kemampuannya menyenangkan hati dan menyentuh hati untuk bergerak, menjadikannya salah satu pembicara NU yang paling populer.

Pidatonya adalah campuran dari khotbah agama, dongeng, propaganda politik yang selalu disampaikan dengan cara yang meyakinkan dan rendah hati (Fealy, 2003 : 231).

Menurut Fealy (2003), Selain kesamaan tersebut, kebanyakan orang NU dan sebagian besar orang Indonesia yang mengagumi dan mencicipinya dalam konteks politik, sangat menghormati presiden pertama Republik Indonesia Ini belum tentu serta merta menjadi menyebabkan Dr. KH. Idham Chalid bersepakat dan mendukung semua gagasan Soekarno. NU terlepas dari penghormatan dan kekaguman dari karakternya memberikan dukungan politik kepada presiden Soekarno.

Dr. KH. Idham Chalid menjadi pendukung Soekarno apalagi pada masa Demokrasi Terpimpin, sekadar untuk menjaga ketertiban NU dan dirinya sendiri dapat terus memainkan peran dalam politik, bahkan tanpa menjadi pemain utama bahkan nyaris terhimpit di antara kekuatan utama Soekarno, PKI dan militer. Pada masa itu, Dr. KH. Idham Chalid memegang posisi tersebut Sebagai anggota DPA, Front Nasional dan Wakil Ketua MPRS.

Dalam peristiwa G30S / PKI, ketika posisi Soekarno dipertanyakan, Dr. KH. Idham Chalid masih setia kepada Sekarno sehingga harus mundur aktivis muda NU tidak puas dengan sikap tolerannya. Aktivis muda NU memainkan peran besar dalam pembunuhan massal terhadap PKI, dan memiliki kecenderungan untuk memuluskan transisi menuju ke Orde Baru. Sampai saat-saat terakhir sikap Soekarno “ keras kepala” untuk mempertahankan komunisme, tampaknya tidak ada simpati bagi para korban kudeta, perubahan politik tampaknya bergerak maju dengan susah payah. Disaat itulah Dr. KH. Idham Chalid terpaksa meninggalkannya dan mempertahankan NU telah mengalami peralihan kekuasaan menuju Orde Baru ( Muhajir, 2007 : 58 ).

### **Kemelut NU**

Dr. KH. Idham Khalid mampu mempertahankan posisinya di pemerintahan dan berbagai lembaga negara Sejak Orde Lama hingga Orde Baru. Peran aktif bersama Rais Am Kiai Wahab Hasbullah sebelum NU menjadi partai politik tahun 1950-an juga menghiiasi perjuangan Dr. KH. Idham Chalid sebagai ulama dan politikus. Dr. KH. Idham Chalid memiliki sikap yang dinamis dan Progresif, menghargai kemajuan bahkan bersifat manusia modern, berpendidikan dan memiliki pergaulan yang sangat luas karena penguasaan bahasa asing. Begitu pula dalam politik, ia bukanlah seorang oportunist sebagai serangkaian tuduhan terhadapnya, hanya karena sifatnya sebenarnya low profile seperti orang Banjar. Duet antara Rais Am Kiai Wahab yang terkenal high profile, gigih dan Kiai Idham Chalid yang rendah hati dan lembut adalah dua yang sempurna. Kepemimpinan Dr. KH. Idham Chalid dalam NU maupun sebagai politisi dipengaruhi oleh Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Abdul Wahid Hasyim, yang Dr. KH. Idham Khalid selalu sebut gurunya ( Mudatsir, 2008 : 14 ).

NU secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari Masyumi pada tahun 1952, Dr. KH. Idham Chalid menjabat sebagai ketua Partai Masyumi dan dia juga memilih NU ikut keluar dari Masyumi. Disaat NU memilih keluar dari Masyumi, disaat itulah NU benar-benar mulai kembali berjuang memulai dari bawah. Namun Dr. KH. Idham Chalid tidak memilih bertahan Masyumi, sedangkan jika pada saat itu ia memilih tetap tinggal di Masyumi, ia akan menjadi orang nomor satu di Masyumi, posisinya akan tetap. Di sini terlihat dari hal tersebut bahwa Dr. KH. Idham Chalid bukanlah orang yang suka bekerja. Kemudian, saat NU menjadi partai politik dan ikut pemilu 1955, NU menempati urutan ketiga setelah PNI dan Masyumi, Dr. KH. Idham Chalid terpilih sebagai anggota DPR dari fraksi partai NU.

Para kritikus merasa bahwa Dr. KH. Idham Chalid tidak layak dan tidak memiliki perinsip. Ketika berbicara tentang sikap keluwesannya Dr. KH. Idham Chalid merupakan ciri khas NU ini penuh warna, apalagi di akhir tahun 50-an sampai 60-an yang mana ia selalu mendasarkan keputusannya pada prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk memiliki *ma La yudraku kulluh la yuthraku kulluh* (komitmen yang tidak mungkin diwujudkan secara keseluruhan tidak boleh ditinggalkan semuanya), *dār al-mafāsīd Muqaddam* “*alā jalb al-maṣālih* (berusaha menghindari bahaya atau lebih tepatnya kerusakan daripada keuntungan), demikian *idza ta āradha mafsadatāni Ru ‘iya a’ zamuhumā dharāran bi irtikābi akhaffihima* (jika ada kemungkinan menyusun ancaman, maka ancaman yang paling berbahaya dianggap ukuran besar risiko dengan melaksanakan paling kecil resiko terkecilnya) (Ali, 1999 : 363-369).

Mitsuo Nakamura dalam pengamatannya pada Muktamar NU ke-26 di Semarang pada tahun 1979 mengatakan Dr. KH. Idham Chalid menghadapi kritik dari para pengurus cabang NU atas kepemimpinannya, hanya menunjukkan sikap pasrah dan sangat meminta maaf kepada para ulama yang memperhitungkan banyaknya kesalahan dalam kepemimpinannya. Ini sangat berbeda dengan KH. Ahmad Syaichu selaku ketua I PBNU yang menanggapi kecaman pengurus cabang NU, menunjukkan sikap politisi sekuler yang terlihat sangat arogan. Di sisi lain, Dr. KH. Idham Chalid berbicara sebagai perwakilan dari fungsionaris pelayanan pusat dan tampaknya berbicara sesuai dengan etos tradisional NU, menunjukkan rasa hormat yang besar kepada ulama daerah. Sedangkan KH. Ahmad Syaichu menentang tradisi dan mencoba untuk dipromosikan ke posisinya memegang komando utama.

Keterlibatan NU dalam PPP sejak awal diwarnai dengan kekecewaan, karena hanya NU dalam pembagian kursi di DPR memperhitungkan bagian 44% di bawah Parmusi. Namun hubungan antara NU dan PPP sudah dimulai terlihat pecah sebelum Pemilu 1982, ketika DPP-PPP tidak menggantikannya nama orang NU calon anggota DPR. Atas insiden ini Dr. Idham Chalid selaku Ketua Umum PBNU dan Ketua Umum Partai PPP karena itu ia banyak disalahkan banyak warga NU. Dr. KH. Idham Khalid dituding kurang tekun, bahkan diyakini terlalu banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur Parmusi dalam penyusunan daftar calon DPR. Dr. KH. Idham Chalid juga ada di posisi

ini semuanya sulit. Beberapa pihak mulai mengeluhkan Kepemimpinan Dr. KH. Idham Chalid karena dianggap lalai amanat Muktamar NU ssebagai Ketua Umum PBNU.

Ketidaksesuaian antara NU dan PPP memang menimbulkan masalah baru di dalam tubuh NU sendiri. Kekecewaan NU terhadap PPP dan Dr. KH. Idham Chalid sebagai ketua umum PPP sekaligus ketua Umum PBNU, Dr. KH. Idham Chalid dibicarakan di mana-mana. Di tambah lagi sejak itu, Dr. KH. Idham Chalid tidak pernah muncul di kantor PBNU, dan Program Dasar Pembangunan 5 tahun NU di Semarang tidak terlaksana sebagai hasil keputusan Muktamar NU. Kekecewaan terhadap Dr. KH. Idham Chalid mendorong pengurus Syuriah di bawah kepemimpinan Kiai As'ad Syamsul Arifin untuk mengadakan kepemimpinannya.

Sebagai pengemban amanat Muktamar NU, Dr. KH. Idham Chalid tidak lagi dianggap sebagai amanahdapat bertindak sebagai Presiden PBNU. Pada tanggal 2 Mei 1982, Dr. KH. Idham Khalid menandatangani pengunduran dirinya dari posisinya sebagai Ketua PBNU di rumahnya dan disaksikan oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Makhsun, Kiai Masykur dan Kiai Machrus Ali. Terutama pernyataan erang atas tanggapan pengunduran diri Dr. KH. Idham Chalid antara pengikut Dr. KH. Idham Chalid dan masyarakat NU tidak bergeming. Mereka dikejutkan lagi 14 Mei 1982 dirilis oleh Dr. KH. Idham Chalid deklarasi penarikan pengunduran diri. Namun, pernyataan ini tidak benar dapatkan jawaban dari para ulama dan pengurus Syuriah NU.

Banyak ada pernyataan terkait status Dr. KH. Idham Chalid dan Ketua PBNU. Dari pihak Dr. KH. Idham Chalid, setelah pernyataan pemberhentian tersebut, ia masih yakin bahwa Ketua Umum PBNU masih ada di tangannya. Namun dari pengurus Ulama dan Syuriah, sejak Dr. KH Idham Chalid menandatangani surat pengunduran dirinya, yang disaksikan Kiai di rumahnya pada tanggal 2 Mei 1982, sah untuk mundur sebagai Ketua PBNU Dr. KH. Idham Chalid dan diambil alih oleh KH. Ali Makhsun sebagai Rais Am PBNU sebelum Muktamar NU 1984. Pada Muktamar NU 1984, ulama Syuriah di bawah pimpinan Kiai As'ad Syamsul Arifin mengangkat KH. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum PBNU. Salah satu keputusan yang diambil pada Muktamar NU 1984 di Situbondo adalah kembalinya NU ke negara bagian Khittah pada tahun 1926 mengembalikan wibawa, peran, fungsi, dan wibawa ulama.

Pada awal 1980-an, rezim Orde Baru berada di bawah Soeharto memaksa NU untuk membuat pilihan yang jelas antara oposisi dan penyesuaian. Semua partai politik dan organisasi masyarakat diwajibkan untuk melakukannya Pancasila sebagai satu-satunya aturan yang juga mengecualikan Islam pandangan dunia lainnya. Lantaran tantangan politik berupa tekanan dari pemerintah Orde Baru, NU pun harus menjawab tantangan tersebut keputusan yang dianggap strategis untuk masa depan bangsa.

Meski pada tahun 1982, Dr. KH. Idham Chalid sebagai ketua umum PBNU mulai merosot, namun peran NU dalam pemerintahan harus tetap ada bekerja dengan benar. Ketika ada satu aturan Pancasila oleh Presiden Soeharto pada tahun 1983, pengambilan keputusan oleh NU diprakarsai

oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin yang bertemu dengan Presiden Soeharto mengukuhkan sekaligus menegaskan kedudukan. Pancasila sebagai landasan negara dan agama sebagai landasan kehidupan. Keputusan NU bukan hanya karena hal itu sebagai jawaban atas tantangan sosial keagamaan dalam perkembangan masyarakat Muslim, namun dalam beberapa kasus, juga karena tantangan politik NU harus bertindak sesuai dengan keinginan pemerintah (Mujammil, 2002 : 106).

Setelah NU resmi menerima prinsip tunggal Pancasila, situasinya berubah menunjukkan kemampuan NU tidak hanya berpegang pada tradisi Religius dan historis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan tantangan perubahan zaman. NU secara formal menerima Pancasila bukan karena signifikansi politiknya, tetapi karena pemahamannya tentang hukum Islam. Perubahan sikap politik NU terhadap kebijakan pemerintah hal ini oleh Orde Baru, dari konfrontatif menjadi akomodatif, Proses dan fungsi yang dilaluinya sesuai dengan kebutuhan situasional. Para elit politik NU yang menanamkan sosialisasi politik melalui proses komunikasi sosial yang berlangsung baik secara kultural maupun struktural, membawa NU pada realitas politik yang seringkali dianggap sangat dilematis.

Selama Dr. KH. Idham Chalid menjadi Ketua umum PBNU mulai luntur pada tahun 1982, tetapi pada pemerintahan Presiden Suharto ia masih menjabat sebagai Ketua DPA RI, anggota BP-7 dan anggota Komite Pertimbangan MUI. Pada Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo, ia masih dipercaya dan diangkat sebagai Mustasyar PBNU. Pada tahun 1985 sebagai Mudir'Am Jam'iyah Pada 7 November 2011, menurut Keppers Nomor 113 / TK / 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Dr. KH. Idham Chalid menjadi pahlawan nasional bersama 6 tokoh lainnya. Dia Merupakan putra dari Banjar ke-3 yang diangkat sebagai pahlawan nasional menyusul Pangeran Antasari dan Hasan Basry. Dr. KH. Idham Chalid sebagai mantan Ketua Umum PBNU selama 28 tahun merangkap mantan ketua MPR/DPR berhak menyandang gelar "Pahlawan Nasional" atas kontribusinya yang luar biasa bagi kepentingan bangsa, negara dan agama. Ahlith Thariqoh al-Mu'tabaroh an-Nahdliyyah.

Pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Bank Indonesia (BI) Secara resmi menerbitkan dan mendistribusikan mata uang Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia tahun emisi 2016 ada 12 pahlawan nasional yang diabadikan dalam gambar wajah uang kertas dan uang Logam. Pada gambar dan nama Dr. KH. Idham Chalid diabadikan ddalam pecahan uang NKRI Rp 5000,-an. Begitu besar jasanya beliau kepada bangsa, Negara, Tanah Air Indonesia dan agama Islam khususnya menjadi organisasi Nahdlatul Ulama yang agung, sehingga setelah kematiannya masih banyak penghargaan yang diberikan oleh berbagai kalangan.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat penulis berikan dari uraian dan pembahasan ini yaitu Dr. KH. Idham Chalid lahir di Setui, Kalimantan Selatan. Ayahnya bernama Muhammad Chalid dan ibunya HJ. Heini. Saat berada di NU, ia mulai aktif mengikuti Gerakan Pemuda Ansor dan menjadi Sekjen PBNU sejak 1952, Kemudian menjadi Ketua Umum PBNU pada tahun 1956-1984. Dalam tatanan pemerintahan masa Orde lama pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo (1956-1957). Pada masa Orde Baru pernah menjadi Menteri Kesra (1966-1967), dan di parlemen sebagai ketua DPR MPR (1971-1977). Di partai PPP sebagai Presiden Partai, dan sebagai ketua di dalam DPA (1978-1983), dan menjadi Anggota BP-7 dan Dewan Pertimbangan MUI (1984-1985).

Sejak pemilu, NU memainkan peran penting dalam poliitik Indonesia. Pada tahun 1955 pada massa Orde Lama, NU menyenut sebagai pendukung Soekarno mengumumkan Demokrasi terpimpin dan mengumumkan partisipasinya di DPR-GR. Meskipun keputusan mendapat banyak perdebatan antara para kalangan ulama NU. Pada masa Orde baru, Soeharto juga menerapkan prinsip asas tunggal Pancasila, NU juga memutuskan menerima Pancasila sebagai atas tunggal organisasi maupun dasar Negara Indonesia. Sejak keputusan ini di ambil menurut prinsip fiqih, *Daral-mafasidmuqaddimun- ala-jalbal maslih* yang artinya menghindarkan terjadinya kerusakan terlebih dahulu dari pada mencari kebaikan. Dr. KH. Idham Chalid dan NU lebih memilih jalan tengah dalam merespon kebijakan pemerintahan. karena jika tidak, Nu lebih memilih memberontak kepada pemerintah, maka nilai itu akan bertentangan dengan ajaran Islam / tradisi Sunni yang selama ini dipertahankan. Hal inilah yang membuat posisi NU dalam pemerintahan sangat kuat dan pemerintah mengakui peran orang-orang NU tidak bisa dipisahkan dari berjalannya sistem pemerintahan selama ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Chalik, A. (2011). *Nahdlatul Ulama dan Geopolitik : Perubahan Daun Kesenambungan*. Yogyakarta: Pinal.

Fealy, G. (2003). *Itjihad Politik Ulama : Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKis.

Feillard, A. (2003). *NU vis-a-vis Negara : Pencarian isi, Bentuk dan Makna*. Yogyakarta: Lkis.

Karim, A. G. (1995). *Metamorfosis NU dan Politisi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Puskata Belajar.

Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia

Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

M. Ali, H. (2011). *Nadhlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik*. Sidoarjo: Al-Maktabah.

Mandan, A. M. (2008). *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid: Tanggung Jawab Politik NU Dalam Sejarah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.

Muhajir, A. (2007). *Idham Chalid : Guru Politik Orang NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

